

**PENANGGULANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AYU PERMATA SARI

21.10.0028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ayu Permata Sari
NPM : 21.10.0028
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : "Penanggulangan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Uang (Studi Kasus Di Polda Sumatera
Selatan)"

Palembang, 5 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Hj. SURYANI YUSI, S.H, M.Hum

PEMBIMBING II

Hj. SAKINAH AGUSTINA, S.H, M.Hum

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

FAKULTAS HUKUM
ERNIWATI, S.H, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Permata Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 Agustus 2003

NPM : 21.10.0028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perijinan Karya Ilmiah ini.

Palembang, 5 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,


Ayu Permata Sari

21.10.0028

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah penanggulangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Kasus Polda Sumatera Selatan). Adapun permasalahan nya: 1). Bagaimana penanggulangan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang di Polda Sumatera Selatan; 2). Apa saja hambatan penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan uang di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan juga didukung oleh empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil pembahasan skripsi ini 1. Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan suatu upaya yang terus menerus dan berkelanjutan yang selalu ada, dan tidak akan pernah ada upaya yang final, namun aparat penegak hukum termasuk kepolisian harus melakukan penindakan dan pemberantasan kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Termasuk pemalsuan uang yang di lakukan secara preventif, preemtif, dan represif oleh penegak hukum sehingga tidak menimbulkan banyaknya korban 2. Hambatan penegakan hukum pemalsuan uang di bagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan eksternal, hambatan internal yaitu seperti kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, dan lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang memerintahkan perbuatannya dan pengungkapan jaringan peredaran uang palsu dalam sistem pembuktian. Sedangkan hambatan eksternal yaitu belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu (Botasupal) dan belum efektifnya sistem kriminalisasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang agar dapat memberikan efek jera secara efektif.

Kata Kunci: Penanggulangan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Uang.

ABSTRACT

The title of this thesis is Legal Response to Counterfeiting Crimes (Case Study of the South Sumatra Regional Police). The problems are: 1). How is the criminal law response to perpetrators of counterfeiting crimes in the South Sumatra Regional Police; 2). What are the obstacles for law enforcement in handling counterfeiting cases in the city of Palembang. This study uses a normative legal research type and is also supported by empirical with a statutory approach (Statute Approach), a case approach (Case Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the discussion of this thesis 1. Crime prevention is actually a continuous and ongoing effort that always exists, and there will never be a final effort, but law enforcement officers including the police must take action and eradicate crime in the criminal justice system. Including counterfeiting that is carried out preventively, preemptively, and repressively by law enforcement so that it does not cause many victims 2. Obstacles to law enforcement against counterfeiting are divided into two, namely internal and external obstacles, internal obstacles such as lack of coordination between law enforcement officers, and weak investigations of perpetrators who are categorized as perpetrators who order their actions and disclosure of counterfeit money circulation networks in the evidence system. While external obstacles include the less than optimal coordination and proactive steps with the Coordinating Agency for the Eradication of Counterfeit Rupiah (Botasupal) and the ineffectiveness of the criminalization system within the framework of criminal responsibility carried out by the criminal justice system against perpetrators of counterfeiting crimes in order to provide an effective deterrent effect.

Keywords: Legal Response, Criminal Acts, Counterfeiting.